

IMPLEMENTASI KEADILAN SOSIAL: DALAM UPAYA MEWUJUDKAN MASYARAKAT INDONESIA YANG SEJAHTERA

Dina Meilina Anggraini¹, Ratih Tantriasari², Rudianto³, Zacky Nur Octavian⁴, Day Ramadhani Amir⁵

¹²³⁴⁵Pendidikan Teknologi Informasi, FPMIPA IKIP PGRI Bojonegoro
Jl. Panglima Polim No.46, Bojonegoro

¹e-mail: dinama6677@gmail.com

²e-mail: tantriasariratih@gmail.com

³e-mail: rudia5255@gmail.com

⁴e-mail: zackynur1424@gmail.com

⁵e-mail: day.ramadhani@ikipgribojonegoro.ac.id

(Diterima : 3 Mei 2024 , direvisi : 16 Mei 2024 , disetujui: 30 Mei 2024)

Abstrak

Keadilan sosial merupakan salah satu pilar fundamental negara Indonesia dan tercantum dalam sila kelima Pancasila. Tercapainya keadilan sosial merupakan kunci Indonesia sejahtera dimana seluruh masyarakat dapat melaksanakan hak dan tanggung jawabnya secara adil dan setara. Penelitian ini mengkaji makna keadilan sosial yg sesuai konteks Indonesia, dan berbagai upaya yang diperlukan untuk mencapainya. Hal ini mencakup analisis terhadap kebijakan, program dan langkah-langkah konkrit yang diperlukan untuk menjamin realisasi hak-hak sosial, dan ekonomi setiap orang secara adil. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif atau pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode studi literature. Studi literature merupakan kegiatan yang berkenaan terkait pengumpulan daftar pustaka. Dengan mempertimbangkan konteks sosial dan ekonomi di Indonesia, Hasil penelitian ini adalah penulis menganalisis bagaimana nilai-nilai keadilan sosial dan ekonomi yang terkandung dalam sila kelima pancasila. Untuk mengatasi kesenjangan yang ada, serta membangun landasan yang kuat bagi inklusi sosial dan ekonomi bagi seluruh warga negara.

Kata Kunci: Pancasila, keadilan Sosial, Konteks Sosial.

Abstract

Social justice is one of the fundamental pillars of the Indonesian state and is listed in the fifth principle of Pancasila. The achievement of social justice is the key to a prosperous Indonesia where all people can exercise their rights and responsibilities fairly and equally. This research examines the meaning of social justice in the Indonesian context, and the various efforts needed to achieve it. This study examines the meaning of social justice in the Indonesian context, and the various efforts needed to achieve it. This includes an analysis of the policies, programs and concrete steps needed to ensure the realization of the social and economic rights of everyone in a fair manner. This research uses a qualitative method or descriptive approach. This research uses a literature study method. Literature study is an activity related to the collection of a bibliography. Taking into account the social and economic context in Indonesia, the results of this study are the authors analyze how the values of social and economic justice contained in the fifth principle of Pancasila. To overcome the existing gaps, and build a strong foundation for social and economic inclusion for all citizens.

Keywords: Pancasila, Social Justice, Social Context.

Dina Meilina A., dkk. Implementasi Keadilan Sosial: dalam Upaya Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Sejahtera

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang sangat luas dengan jumlah penduduk sekitar 200 juta jiwa. Dengan banyaknya jumlah penduduk dengan latar belakang sosial dan pendapatan per kapita yang berbeda, maka rentan terjadi adanya kesenjangan sosial dan ekonomi. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, masyarakat Indonesia mengakui Pancasila sebagai landasan, kebijakan dan falsafah hidup bangsa yang nilai-nilainya bersumber dari kehidupan masyarakat itu sendiri (Azmi dkk, 2024).

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia (Ikrom dkk,2023). Pancasila sebagai ideologi Negara Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan kata lain, seluruh struktur kehidupan bermasyarakat menggunakan Pancasila sebagai tolak ukur perilaku, pandangan hidup dan tujuan warga negara Indonesia (Ikrom dkk, 2023). Setiap sila pada Pancasila memiliki nilai dan makna yang memiliki tujuan mewujudkan terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Menghargai dan menghormati keberagaman budaya, agama, dan etnis di Indonesia. Menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Indonesia semakin berdaya dan menjaga moral bangsa dengan dengan pandangan hidup bernegara (Eliza dkk, 2024).

Salah satunya sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki arti setiap warga Indonesia berhak mendapatkan perlakuan yang baik, dalam bidang ekonomi maupun sosial (Sari dkk, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai keadilan sosial dan ekonomi yang terkandung dalam sila kelima Pancasila diterapkan di Indonesia. Dengan menelaah berbagai kebijakan, program, dan inisiatif yang telah dijalankan, penelitian ini berusaha mengidentifikasi hambatan serta peluang yang ada dalam mencapai keadilan yang merata. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami sejauh mana kebijakan ekonomi nasional mendukung distribusi

kekayaan yang adil, akses yang setara terhadap layanan dasar, dan pengentasan kemiskinan.

Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya memahami dan mengimplementasikan sila kelima Pancasila, sehingga dapat terwujud masyarakat Indonesia yang lebih adil, makmur, dan sejahtera bagi seluruh rakyat tanpa kecuali.

METODE

Penelitian tentang “Implementasi Keadilan Sosial: Dalam Upaya Mewujudkan Masyarakat Indonesia Yang Sejahtera”, menggunakan metode yang akurat untuk memahami dengan baik konteks dan teori yang mendasari topik artikel. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif menggambarkan suatu pendekatan penelitian yang berfokus pada pengumpulan data yang beragam dan terperinci untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena yang diteliti (Niam, 2024). Metode ini berbeda dengan penelitian kuantitatif yang fokus pada pengukuran dan analisis statistik. Sebab, penelitian kualitatif berfokus pada interpretasi, konteks, dan kompleksitas data yang dikumpulkan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sering menggunakan teknik seperti observasi partisipan, wawancara mendalam, studi kasus, analisis isi, atau analisis naratif untuk memperoleh pemahaman lebih dalam terhadap masalah yang diselidiki. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengkaji aspek subjektif, kontekstual, dan multidimensi dari fenomena yang diteliti. Penelitian kualitatif sering digunakan untuk menjawab pertanyaan kompleks yang melibatkan aspek subjektif, kontekstual, dan kualitatif dari fenomena manusia (Niam, 2024).

Penelitian ini juga menggunakan metode studi literature. Menurut (Creswell dalam Erika dkk, 2021) menyatakan bahwa metode literatur adalah ringkasan tertulis dari artikel-artikel di majalah, buku dan dokumen lain yang menggambarkan teori dan informasi tentang organisasi perpustakaan di masa lalu dan sekarang, serta topik dan dokumennya. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan suatu

metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau sumber yang berkaitan dengan topik yang disajikan dalam makalah penelitian.

Metode lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah web searching. Afrika dalam Cuhazriansyah (2023) menyatakan bahwa situs web program pembelajaran yang efektif adalah alat penting yang memberikan informasi, layanan, dan peluang pendidikan terbaik kepada siswa . Web searching menawarkan beberapa manfaat dalam penulisan jurnal. Internet menyediakan akses ke sejumlah besar informasi dari berbagai sumber dengan cepat dan mudah, menghemat waktu dan tenaga dibandingkan dengan metode pencarian tradisional seperti membaca buku atau mencari diperpustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Nilai pancasila yang Relevan dengan Keadilan Sosial dan ekonomi

Pancasila sebagai dasar negara mempunyai arti bahwa Pancasila adalah dasar penyelenggaraan kehidupan nasional negara Indonesia. Status Pancasila sebagai dasar negara sesuai dengan ketentuan Pasal 4 UUD 1945, dan status khusus ini juga menjadikan Pancasila mempunyai fungsi yang kuat dalam proses penyelenggaraan kehidupan berbangsa. Pasal-pasal UUD 1945 yang mengatur tentang peranan Pancasila dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa. Salah satu ketentuan yang menjadi penekanan dalam Pancasila adalah sila kelima atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan kata lain, negara mewajibkan perekonomian Indonesia berdasarkan asas kekeluargaan, yaitu penguasaan sektor-sektor produktif yang penting bagi Indonesia. Bukan sekedar penguasaan negara atas hajat hidup orang banyak Negara Indonesia ingin agar kekayaan alam Indonesia dimanfaatkan dan ingin agar seluruh warga negaranya mendapat perlakuan yang sangat adil, baik materi maupun spiritual, sepanjang hidupnya. Indonesia juga ingin warganya mempunyai akses terhadap pendidikan yang maksimal dan komprehensif (Handayani, 2021).

1. Keadilan Sosial

Sila kelima Pancasila menekankan pentingnya pemerataan, pamarataan kekayaan, dan kesempatan yang adil bagi seluruh warga negara. Dalam konteks kebijakan sosial, prinsip kelima mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan nyata untuk menciptakan keadilan sosial, seperti program kesejahteraan, subsidi pendidikan dan pemaerataan kesempatan dalam pelayanan kesehatan. Hal ini menciptakan sikap solidaritas antar masyarakat (Yasila dkk, 2022).

Menurut Hadi dalam Lestari (2020) bahwa sila kelima ini mangandung nilai kesamaan derajat maupun kewajiban dan hak, pada dasarnya manusia memiliki hak dan kewajiban yang sesuai dengan porsinya masing-masing, selain itu masyarakat diberikan kebebasan mengutarakan pendapatnya. Selanjutnya cinta dan mencintai, manusia ditakdirkan untuk memiliki suatu rasa selain bisa peka terhadap sesuatu tetapi juga bisa mengerti bagaimana cara kita bersyukur. Rasa hormat menghormati antar manusia, keberanian membela kebenaran dan keadilan dengan tetap pada perlindungan hukum, toleransi dan gotong royong, yang hakekatnya manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan beradab serta harus adil.

Keadilan sosial berarti mencapai keseimbangan antara kehidupan pribadi dan bermasyarakat. Ini menyangkut kehidupan jasmani dan rohani, maka keadilan juga mencakup keadilan dalam pemenuhan tuntutan hidup rohani secara seimbang. Hakikat sila kelima terdapat pada alenia kedua pembukaan UUD 1945 yang menyatakan “Dan perjuangan kebangsaan indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentiasa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur” (Lestari dkk, 2020).

Dalam konteks keadilan sosial, terdapat beberapa nilai-nilai Pancasila yang penting dan dapat menjadi landasan bagi terselenggaranya keadilan sosial di Indonesia, salah satunya terdapat pada sila kelima pancasila. prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menekankan

Dina Meilina A., dkk. Implementasi Keadilan Sosial: dalam Upaya Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Sejahtera

pentingnya mewujudkan keadilan, salah satunya keadilan sosial dan ekonomi (Aqiilah dkk, 2023).

Keadilan sosial mencakup pemerataan sumber daya, perlindungan hak dan keadilan, serta peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dari sudut pandang keadilan ekonomi, prinsip ini menjadi landasan penting dalam membentuk kebijakan publik yang bertujuan untuk mengatasi kesenjangan sosial, mengurangi kemiskinan dan menjamin akses yang adil terhadap sumber daya dan layanan publik (Ningsih dkk, 2023).

Penerapan Pancasila juga menempatkan keadilan sosial sebagai tanggung jawab negara. Pemerintah dan lembaga terkait diharapkan dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam tindakan nyata, seperti peumusan kebijakan ekonomi yang mendukung masyarakat luas, pembangunan infrastruktur yang memadai, dan pengentasan kemiskinan. Bagi Indonesia, negara dengan beragam agama dan budaya penting untuk menghormati, menghargai perbedaan dan keadilan demi menjaga keharmonisan sosial dan menghindari konflik (Ningsih dkk, 2023).

2. Keadilan Ekonomi

Menurut Bertens dalam Kholifah (2020) ekonomi dan keadilan mempunyai keterkaitan yang erat, apalagi jika dilihat dari sumbernya, yaitu sama-sama timbul dari kelangkaan atau keterbatasan suatu hal. Seperti kita ketahui ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana masyarakat mengelola dan menggunakan sumber daya yang langka dan terbatas. Pada saat yang sama, permasalahan yang berkaitan dengan keadilan muncul ketika terjadi kelangkaan, yang menyebabkan tidak tersedianya porsi pangan yang cukup untuk semua orang.

Menurut John L Esposito dalam Fariz (2023) ekonomi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan sumber daya yang tersedia, segala usaha dan upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup tersebut untuk mencapai kehidupan yang sejahtera.

Keadilan dalam perekonomian pada dasarnya juga merupakan peradaban ekonomi Indonesia yang dibangun berdasarkan prinsip Pancasila. Diantara lima sila bagi seluruh rakyat Indonesia, tiga sila yang paling alami adalah sila keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketuhanan Yang Maha Esa. Dari situlah lahir ungkapan baku “masyarakat adil dan makmur”. kedua makna tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain, namun saling melengkapi dan bersama-sama menghendaki kehidupan yang baik bagi masyarakat Indonesia. Keadilan tidak dapat tercapai jika barang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh warga negara, sementara kekayaan tidak ada. memastikan bahwa keadilan tercapai ketika barang-barang yang tersedia tidak didistribusikan secara merata di antara seluruh anggota masyarakat (Bertens dalam Kholifah 2020).

Pembangunan ekonomi yang ideal dapat mewujudkan dan mempengaruhi pemerataan ekonomi secara optimal, apabila pertumbuhan ekonomi tidak hanya diperlukan, tetapi juga dibarengi dengan pemerataan dan pembangunan ekonomi yang berkeadilan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sriwahyuni dkk, 2023).

Ketidakadilan dan ketimpangan saat ini merupakan fenomena yang terlihat baik di negara maju maupun berkembang yang menganut sistem ekonomi kapitalis. Hal ini menyebabkan peningkatan angka kemiskinan. Jelas terdapat kesalahan dalam konsep yang diterapkan di berbagai negara, karena masih jauh dari harapan yang diinginkan. Terbukti dengan tidak tercapainya tujuan seperti pemenuhan kebutuhan dasar dan penciptaan lapangan kerja penuh dan pemerataan pendapatan dan kekayaan (Amin, 2023).

Dengan mewujudkan sila kelima nilai Pancasila diharapkan dapat terciptanya sistem perekonomian dan sosial yang adil dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Pancasila memandu perumusan undang-undang dan kebijakan yang menjamin perlindungan hak asasi manusia, kebebasan

beragama, persamaan di depan hukum, dan kesetaraan serta akses terhadap layanan dasar (Ningsih dkk, 2023).

Untuk mewujudkan keadilan sosial, para pengambil keputusan dan masyarakat harus memahami dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila dengan baik. Diperlukan upaya nyata untuk memperkuat pemahaman dan kesadaran akan pentingnya keadilan sosial dan ekonomi serta memastikan nilai-nilai Pancasila tercermin dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Ningsih dkk, 2023).

Dengan demikian, pengakuan dan penerapan sila kelima pancasila menjadi landasan yang kuat dalam terwujudnya keadilan sosial dan ekonomi di Indonesia. Dengan pemahaman yang mendalam tentang Pancasila dan implementasinya dalam kebijakan dan tindakan nyata, diharapkan dapat mewujudkan masyarakat adil, adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia (Ningsih dkk, 2023).

B. Hambatan dan Peluang Mewujudkan Keadilan Sosial dan Ekonomi di dalam Masyarakat

1. Keadilan Sosial

Tantangan dalam penerapan sila kelima Pancasila adalah menciptakan pedoman perilaku sosial agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dapat mempengaruhi perilaku masyarakat. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila hendaknya diterapkan dalam kehidupan sesuai standar dan etika yang berlaku (Amalia dkk, 2023). Sila kelima Pancasila yang mengutamakan keadilan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia merupakan landasan terpenting dalam mencapai tujuan negara yang adil dan merata. Sebab, keluarga dapat dianggap sebagai faktor dominan dalam pembentukan semangat kebangsaan (Saputra dkk, 2021).

Namun dalam praktiknya, penerapan prinsip kelima menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar di negara ini adalah kesenjangan ekonomi dan sosial yang terus berlanjut. Ketika para pekerja migran tersebut bekerja di berbagai bidang seperti pendidikan, konstruksi,

manajemen, bahkan ketenagakerjaan, mereka justru kehilangan tenaga kerja lokal dan meningkatkan angka pengangguran karena tenaga kerja lokal kalah bersaing dengan tenaga kerja asing (Abdu, 2020). Meskipun pemerintah berkomitmen terhadap prinsip-prinsip keadilan sosial, kesenjangan dalam distribusi sumber daya dan akses terhadap layanan dasar masih merupakan permasalahan yang perlu diatasi.

Selain itu, korupsi, lambatnya birokrasi dan kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik juga menghambat penerapan prinsip sila kelima. Oleh karena itu, upaya menghilangkan kesenjangan sosial dan mewujudkan keadilan sosial harus lebih ditingkatkan, antara lain melalui perbaikan regulasi, pencegahan korupsi, dan antikorupsi. Upaya berdedikasi untuk memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan layanan penting. Jangan egois jika memanfaatkan ruang publik untuk kepentingan pribadi. Sahadeva dkk (2022) mengatakan dengan mengatasi berbagai tantangan tersebut, pemerintah dan masyarakat Indonesia dapat lebih efektif menerapkan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan menutup kesenjangan yang ada.

Menurut Mukhlis (2020) dapat dilihat dari tujuan Pendidikan Nasional yang terdapat dalam undang-undang sisdiknas, diantaranya adalah:

- a. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia.
- b. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar.
- c. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral.
- d. Meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas lembaga pendidikan dan pengelolanya sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap dan nilai berdasarkan standar nasional dan global.

- e. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks NKRI.

2. Keadilan Ekonomi

Menurut Ainiyah (2023) ketimpangan ekonomi adalah perbedaan distribusi kekayaan, pendapatan, dan sumber daya ekonomi antar individu, kelompok, atau negara dalam suatu masyarakat. Ketimpangan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk ketimpangan pendapatan, akses terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi dan sosial lainnya. Terdapat dimensi berbeda untuk mengukur kesenjangan ekonomi:

- a. Ketidaksetaraan Pendapat

Ketimpangan Pendapatan Ketimpangan pendapatan mencerminkan derajat ketimpangan pendapatan individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Hal ini dapat diukur dengan menggunakan berbagai metode, termasuk indeks Gini , yang menghitung seberapa jauh penyimpangan distribusi pendapatan sebenarnya dari distribusi pendapatan sempurna (jika setiap orang memiliki pendapatan yang sama).

- b. Ketidaksetaraan Kekayaan

Ketimpangan Kekayaan Ketimpangan kekayaan mengacu pada perbedaan kepemilikan real estat dan aset, termasuk real estat, investasi, dan uang tunai. Individu atau kelompok dengan kekayaan lebih besar mempunyai keuntungan ekonomi dan mempunyai akses lebih besar terhadap peluang dan layanan.

- c. Ketidaksetaraan Akses Pendidikan dan Kesehatan

Ketimpangan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan Ketimpangan juga terlihat dalam akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Masyarakat dengan akses terbatas terhadap pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan cenderung mengalami kesenjangan dalam kesempatan hidup dan kesuksesan karier.

d. Ketimpangan Peluang Ekonomi

Ketimpangan peluang ekonomi mencerminkan sejauh mana individu atau kelompok mempunyai akses terhadap pekerjaan yang layak, peluang kewirausahaan, dan peluang ekonomi lainnya. Pembatasan peluang ekonomi dapat memberikan perbedaan besar terhadap kesejahteraan dan kesuksesan ekonomi seseorang. Ketimpangan ekonomi juga dapat berdampak serius terhadap stabilitas sosial, mobilitas sosial, dan peluang hidup.

Kebijakan dan Tindakan Publik Kebijakan fiskal juga berperan penting dalam meningkatkan distribusi pendapatan dan kesejahteraan sosial. Parera (2022) menunjukkan bahwa kebijakan fiskal daerah Papua berdampak positif terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pengurangan kemiskinan melalui alokasi anggaran yang lebih besar untuk program-program sosial. Kebijakan tersebut telah berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup 4.444 orang yang tinggal di daerah tertinggal. Fakhruddin (2023) menambahkan bahwa kebijakan moneter di era digital dapat membantu mendistribusikan pendapatan secara lebih merata dengan memberlakukan pajak cukai pada game digital. Pendekatan ini menunjukkan bahwa inovasi dalam kebijakan fiskal dapat membantu memerangi ketimpangan pendapatan.

Saputra dan Mirawati (2023) menunjukkan bahwa penerapan kebijakan fiskal yang adil seperti yang diterapkan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan pendapatan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keadilan kebijakan fiskal sangat penting untuk mencapai kesejahteraan sosial.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pancasila sebagai dasar negara mempunyai arti bahwa Pancasila adalah dasar penyelenggaraan kehidupan nasional negara Indonesia. Status Pancasila sebagai dasar negara sesuai dengan ketentuan Pasal 4 UUD 1945, dan status

khusus ini juga menjadikan Pancasila mempunyai fungsi yang kuat dalam proses penyelenggaraan kehidupan berbangsa. Pasal-pasal UUD 1945 yang mengatur tentang peranan Pancasila dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa. Salah satu ketentuan yang menjadi penekanan dalam Pancasila adalah sila kelima atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keadilan sosial adalah fondasi untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan adil. Ini mencakup distribusi sumber daya yang merata, pengakuan hak-hak dasar setiap warga negara, dan upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial.

Keadilan ekonomi melibatkan akses yang adil terhadap kesempatan ekonomi, pekerjaan yang layak, dan distribusi pendapatan yang lebih seimbang. Ini berarti pemerintah harus menciptakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Pemerintah memiliki peran krusial dalam mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan dan regulasi yang mendukung redistribusi sumber daya, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta perlindungan sosial bagi kelompok rentan.

Namun ada beberapa Tantangan dalam penerapan sila kelima Pancasila adalah menciptakan pedoman perilaku sosial agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dapat mempengaruhi perilaku masyarakat. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila hendaknya diterapkan dalam kehidupan sesuai standar dan etika yang berlaku (Najicha dkk, 2023). Sila kelima Pancasila yang mengutamakan keadilan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia merupakan landasan terpenting dalam mencapai tujuan negara yang adil dan merata. Sebab, keluarga dapat dianggap sebagai faktor dominan dalam pembentukan semangat kebangsaan (Saputra dkk 2021). Namun dalam praktiknya, penerapan prinsip kelima menghadapi berbagai tantangan.

Penelitian ini menekankan bahwa untuk mencapai suatu keadilan sosial dan ekonomi adalah proses yang kompleks dan berkelanjutan, yang memerlukan komitmen kuat dari semua pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Dengan upaya bersama, diharapkan agar masyarakat Indonesia

mendapatkan kesejahteraan dan keadilan baik dalam segi ekonomi maupun sosial dan diharapkan dapat terwujud sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainiyah, Rifqi Alya Nur. 2023. Dampak Ketidaksetaraan Ekonomi terhadap Patologi Sosial di Masyarakat Modern. *Liberosis: Jurnal Psikologi dan Bimbingan Konseling*. 1(2): 11-20.
- Amin, D. 2023. Pemerataan Dan Keadilan Ekonomi Di Indonesia (Perspektif Ekonomi Syariah). *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah*. 5(01).
- Aqiilah, I. N., & Najicha, F. U 2023. Peran Keadilan Sosial Dalam Mengatasi Kesenjangan Sosial: Evaluasi Terhadap Realisasi Sila Kelima Pancasila. *Researchgate*, Surakarta: Desember 2023.
- Azmii, A. F., dkk. 2024. Pentingnya Pancasila Sebagai Ideologi Negara Dalam Membangun Kesejahteraan Bangsa. *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*. 2(2): 151-160.
- Cuhanazriansyah, M. R., & Cahyaningrum, Y. 2023. Optimalisasi pengembangan website program studi pendidikan teknologi informasi dengan integrasi data center. *Jurnal Penelitian Guru Indonesia*. 8(2): 217-220.
- Eliza, K. M., Sari, S., Hellenia, S., Tianasati, F., & Hasan, Z. 2024. Implementasi Nilai-nilai Pancasila Sebagai Ideologi Negara Dalam Kehidupan Masyarakat Di Era Globalisasi. *Journal Of Law and Nation*. 3(2): 341-350.
- Erika, E., Astalini, A., & Kurniawan, D. A. 2021. Literatur review: penerapan sintaks model pembelajaran problem solving pada kurikulum 2013. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*. 5(1): 147-153.
- Fariz, T. A., Nugraha, G., AlFauzan, M. R., & Sumaryono, D. M. 2023. Demokrasi Pancasila Dalam Isu Ekonomi. *Advances In Social Humanities Research*. 1(5): 737-742.
- Handayani, P. A., & Dewi, D. A. 2021. Implementasi Pancasila Sebagai Dasar Negara. *Jurnal Kewarganegaraan*. 5(1): 6-12.
- Ikrom, M., Zania, B., & Maulia, S. T. 2023. Pancasila Sebagai Dasar Negara Dan Ideologi Bangsa. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*. 2(1): 112-122.
- Kholifah, A. 2020. Penerapan Keadilan dalam Pembangunan Ekonomi dengan Kebijakan Investasi melalui Bank syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi, dan Perbankan*. 4(2): 333-356.
- Lestari, P., Sunarto, S., & Cahyono, H. 2020. Implementasi nilai-nilai pancasila pada sila kelima dalam pembelajaran. *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*. 7(2): 130-144.
- Mukhlis, M., dkk. 2020. Pendidikan dan Keadilan Sosial. *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman*. 8(1): 141-150.
- Niam, M. F., dkk. 2024. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV Widina Media Utama.
- Ningsih, J. R., Dara, F. L., & Putri, W. A. M. 2023. Pancasila Sebagai Dasar Hukum dalam Mewujudkan Keadilan Sosial. *Advances In Social Humanities Research*. 1(4): 462-470.
- Dina Meilina A., dkk. *Implementasi Keadilan Sosial: dalam Upaya Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Sejahtera*

- Rahmiyanti, D. 2018. Implementasi Keadilan dalam Pembangunan Ekonomi Islam. *Al-Buhuts*. 14(02): 53-68.
- Sari, F. M., Astuti, A., Zamanda, D., Restu, F. P., & Fadilla, A. 2024. Kebijakan Fiskal dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia. *Journal of Economics, Assets, and Evaluation*. 1(4): 1-10.
- Sriwahyuni, S., Nasution, M. Y., & Sugianto, S. 2023. Konsep Keadilan Ekonomi Islam. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*. 6(2): 215-226.